

Nomor : B/ 96 /S.SM.00.00/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Pengisian  
Survei Budaya Kerja ASN 2022

28 Juli 2022

Yth. Para Sekretaris Jenderal/Kementerian/Utama/Daerah  
pada Instansi Pemerintah  
di  
Tempat

Setelah satu tahun ditetapkannya *core values* BerAKHLAK, banyak hal telah diupayakan untuk menginternalisasi *core values* ASN hingga ke penjuru negeri. Dalam rangka mengukur keberhasilan implementasi *Core Values* ASN dan *Employer Branding* Bangsa Melayani Bangsa di seluruh Instansi Pemerintah, kami bermaksud melakukan Survei Indeks BerAKHLAK dan Survei Keterikatan Pegawai ASN (*Employee Engagement*).

Survei Indeks BerAKHLAK bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan budaya organisasi diantaranya mengenai implementasi *Core Values* BerAKHLAK, keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi, serta aspirasi pegawai ASN terhadap kondisi budaya yang ideal. Sedangkan Survei Keterikatan Pegawai ASN (*Employee Engagement*) untuk mengetahui sejauh mana tingkat keterikatan pegawai untuk berkomitmen sebagai ASN pada lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Oleh karena itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan survei dimaksud. Untuk informasi secara detail terkait pedoman pelaksanaan survei, dapat dilihat pada lampiran surat.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kementerian PANRB,



Lampiran I  
Nomor : B/ 96 /S.SM.00.00/2022  
Perihal : Permohonan Pengisian  
Survei Budaya Kerja  
ASN 2022  
Tanggal : 28 Juli 2022

### Pedoman Pelaksanaan Survei Indeks BerAKHLAK

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengisian survei Indeks BerAKHLAK sebagai berikut:

1. Pengisian Survei Indeks BerAKHLAK dilakukan mulai tanggal 29 Agustus hingga 6 Desember 2022 secara bertahap berdasarkan kelompok wilayah;
2. Pegawai yang akan melakukan pengisian survei Indeks BerAKHLAK berstatus sebagai ASN (baik PNS atau PPPK);
3. **Seluruh ASN di setiap Instansi Pemerintah harus mengisi survei tersebut;**
4. Jadwal pengisian survei dilaksanakan berdasarkan pembagian kelompok sebagai berikut:

|                   | Kelompok 1   | Kelompok 2  | Kelompok 3   | Kelompok 4                         |
|-------------------|--|---|--|------------------------------------|
| <b>Waktu</b>      | 29 Agustus –<br>15 Oktober 2022                                    | 16 – 31 Oktober<br>2022   | 1– 13 November<br>2022   | 14 November–<br>6 Desember<br>2022 |
| <b>Peserta*</b>   | Pemerintah<br>Daerah yang<br>berada di Wilayah<br>Indonesia Barat* | Pemerintah Daerah<br>yang berada di<br>Wilayah Indonesia<br>Tengah* | Pemerintah<br>Daerah yang<br>berada di Wilayah<br>Indonesia Timur* | Pemerintah<br>Pusat*               |
| <b>PIN</b>        | WIB001   | WITA02  | WIT003   | IPUSAT                             |
| <b>Narahubung</b> | Sdri. Giovani<br>(0856-2565-038)                                   | Sdri. Astri<br>(0878-8648-8689)                                     | Sdri. Aldyra<br>(0812-8718-0340)                                   | Sdri. Giovani<br>(0856-2565-038)   |

\*= Informasi detail pembagian kelompok dapat dilihat pada Lampiran III

5. Survei Indeks BerAKHLAK oleh Kementerian PANRB dapat diakses melalui laman <https://sib.menpan.go.id> Video tutorial sebagai petunjuk pengisian survei dapat dilihat pada tautan [https://bit.ly/tutorial\\_pengisian\\_survei](https://bit.ly/tutorial_pengisian_survei). Untuk informasi lebih lanjut mengenai survei Indeks BerAKHLAK dapat menghubungi narahubung sesuai dengan pembagian kelompok diatas.

Lampiran II  
Nomor : B/ 96 /S.SM.00.00/2022  
Perihal : Permohonan Pengisian  
Survei Budaya Kerja  
ASN 2022  
Tanggal : 28 Juli 2022

***Pedoman Survei Keterikatan Pegawai ASN (Employee Engagement)***

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengisian survei keterikatan pegawai ASN adalah sebagai berikut:

1. Pengisian Survei Keterikatan Pegawai ASN dilakukan berdasarkan pembagian kelompok;
2. Pegawai yang akan melakukan pengisian survei berstatus sebagai ASN (baik PNS atau PPPK);
3. **Jumlah pegawai yang akan melakukan pengisian survei paling sedikit berjumlah 140 (seratus empat puluh) orang dari total jumlah pegawai pada masing-masing instansi;**
4. Adapun pembagian jumlah pegawai yang akan melakukan pengisian survei pada unit kerja instansi vertikal dapat mewakili setiap kelompok jabatan dari berbagai jenjang (JPT-JA-JF) dan pengaturannya diserahkan kepada masing-masing instansi;
5. Bagi instansi pusat vertikal yang memiliki unit kerja di seluruh Indonesia, pegawai yang akan melakukan pengisian survei diharapkan dapat mewakili seluruh unit kerja dari berbagai wilayah di Indonesia (Wilayah Timur/Tengah/Barat);
6. Jadwal pengisian survei dilaksanakan berdasarkan pembagian kelompok sebagai berikut:

|                        | Kelompok 1   | Kelompok 2                                 | Kelompok 3                                | Kelompok 4 |
|------------------------|--|--|---|------------|
| <b>Waktu</b>           | <b><i>Pembagian tanggal pelaksanaan akan diinformasikan kemudian</i></b> |  |   |            |
| <b>Peserta</b>         | IP yang berada di Wilayah Indonesia Barat                                | IP yang berada di Wilayah Indonesia Tengah | IP yang berada di Wilayah Indonesia Timur | IP Pusat   |
| <b>Kode/PIN survei</b> | <b><i>Pembagian kode/PIN surveil akan diinformasikan kemudian</i></b>    |  |   |            |

7. Survei Keterikatan Pegawai ASN oleh Kementerian PANRB dapat diakses melalui laman <https://sueb.menpan.go.id/> Untuk informasi lebih lanjut mengenai survei Keterikatan Pegawai ASN (*Employee Engagement*) dapat menghubungi narahubung Sdri. Acha (085641602005), Sdri. Iknandi Intan (087729376154) dan/atau Sdr. Rasio (081913444475).

## Lampiran III

Nomor : B/ 96 /S.SM.00.00/2022

Perihal : Permohonan Pengisian Survei Budaya  
Kerja ASN 2022

Tanggal : 28 Juli 2022

| <b>Instansi Pemerintah Wilayah Indonesia Barat</b> | <b>Instansi Pemerintah Wilayah Indonesia Tengah</b> | <b>Instansi Pemerintah Wilayah Indonesia Timur</b> | <b>Instansi Pusat</b>  |
|--|---|--|--|
| Pemerintah Provinsi Aceh                           | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat             | Pemerintah Provinsi Maluku                         | Arsip Nasional Republik Indonesia  |
| Pemerintah Kabupaten Aceh Barat                    | Pemerintah Kabupaten Bima                           | Pemerintah Kabupaten Buru                          | Badan Keamanan Laut  |
| Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya               | Pemerintah Kabupaten Dompu                          | Pemerintah Kabupaten Buru Selatan                  | Badan Kepegawaian Negara   |
| Pemerintah Kabupaten Aceh Besar                    | Pemerintah Kabupaten Lombok Barat                   | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru                 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional                         |
| Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya                     | Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah                  | Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya             | Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal                     |
| Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan                  | Pemerintah Kabupaten Lombok Timur                   | Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah                 | Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional / Badan Informasi Geospasial |
| Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil                  | Pemerintah Kabupaten Lombok Utara                   | Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara               | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika                              |
| Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang                  | Pemerintah Kabupaten Sumbawa                        | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar            | Badan Narkotika Nasional   |
| Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah                   | Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat                  | Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat            | Badan Nasional Penanggulangan Bencana                                      |
| Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara                 | Pemerintah Kota Bima                                | Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur            | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme                                    |

|                                   |   |  |   |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Pemerintah Kabupaten Aceh Timur   | Pemerintah Kota Mataram                 | Pemerintah Kota Ambon                  | Badan Nasional Pencarian Pertolongan                                  |
| Pemerintah Kabupaten Aceh Utara   | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Pemerintah Kota Tual                   | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia                            |
| Pemerintah Kabupaten Bener Meriah | Pemerintah Kabupaten Alor               | Pemerintah Provinsi Maluku Utara       | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila                                    |
| Pemerintah Kabupaten Bireuen      | Pemerintah Kabupaten Belu               | Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat   | Badan Pemeriksa Keuangan  |
| Pemerintah Kabupaten Gayo Lues    | Pemerintah Kabupaten Ende               | Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan | Badan Pengawas Obat dan Makanan                                       |
| Pemerintah Kabupaten Nagan raya   | Pemerintah Kabupaten Flores Timur       | Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah  | Badan Pengawas Pemilihan Umum   |
| Pemerintah Kabupaten Pidie        | Pemerintah Kabupaten Kupang             | Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur   | Badan Pengawas Tenaga Nuklir  |
| Pemerintah Kabupaten Pidie jaya   | Pemerintah Kabupaten Lembata            | Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara   | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan                             |
| Pemerintah Kabupaten Simeulue     | Pemerintah Kabupaten Malaka             | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula    | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam |
| Pemerintah Kota Banda Aceh        | Pemerintah Kabupaten Manggarai          | Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai     | Badan Pusat Statistik   |
| Pemerintah Kota Langsa            | Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat    | Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu     | Badan Siber dan Sandi Negara  |
| Pemerintah Kota Lhokseumawe       | Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur    | Pemerintah Kota Ternate                | Badan Standardisasi Nasional  |
| Pemerintah Kota Sabang            | Pemerintah Kabupaten Nagekeo            | Pemerintah Kota Tidore Kepulauan       | Kejaksaan Republik Indonesia  |
| Pemerintah Kota Subulussalam      | Pemerintah Kabupaten Ngada              | Pemerintah Provinsi Papua              | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi     |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Pemerintah Provinsi Sumatera Utara       | Pemerintah Kabupaten Rote Ndao            | Pemerintah Kabupaten Biak Numfor        | Kementerian Agama   |
| Pemerintah Kabupaten Asahan              | Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua          | Pemerintah Kabupaten Jayapura           | Badan Pertanahan Nasional / Kementerian Agraria dan Tata Ruang    |
| Pemerintah Kabupaten Batubara            | Pemerintah Kabupaten Sikka                | Pemerintah Kabupaten Keerom             | Kementerian Badan Usaha Milik Negara                              |
| Pemerintah Kabupaten Dairi               | Pemerintah Kabupaten Sumba Barat          | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen    | Kementerian Dalam Negeri  |
| Pemerintah Kabupaten Deli Serdang        | Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya     | Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya     | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral                        |
| Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan  | Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah         | Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia                           |
| Pemerintah Kabupaten Karo                | Pemerintah Kabupaten Sumba Timur          | Pemerintah Kabupaten Sarmi              | Kementerian Kelautan dan Perikanan                                |
| Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu         | Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan | Pemerintah Kabupaten Supiori            | Kementerian Kesehatan   |
| Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan | Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara   | Pemerintah Kabupaten Waropen            | Kementerian Ketenagakerjaan                                       |
| Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara   | Pemerintah Kota Kupang                    | Pemerintah Kota Jayapura                | Kementerian Keuangan  |
| Pemerintah Kabupaten Langkat             | Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan    | Pemerintah Provinsi Papua Barat         | Kementerian Komunikasi dan Informatika                            |
| Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal    | Pemerintah Kabupaten Balangan             | Pemerintah Kabupaten Fak-Fak            | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi          |
| Pemerintah Kabupaten Nias                | Pemerintah Kabupaten Banjar               | Pemerintah Kabupaten Kaimana            | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan |
| Pemerintah Kabupaten Nias Barat          | Pemerintah Kabupaten Barito Kuala         | Pemerintah Kabupaten Manokwari          | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian                       |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Pemerintah Kabupaten Nias Selatan       | Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan      | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan                         |
| Pemerintah Kabupaten Nias Utara         | Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah  | Pemerintah Kabupaten Maybrat                | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah                                   |
| Pemerintah Kabupaten Padang Lawas       | Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara   | Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak       | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  |
| Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara | Pemerintah Kabupaten Kotabaru            | Pemerintah Kabupaten Raja Ampat             | Kementerian Luar Negeri   |
| Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat      | Pemerintah Kabupaten Tabalong            | Pemerintah Kabupaten Sorong                 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif     |
| Pemerintah Kabupaten Samosir            | Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu         | Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan         | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                     |
| Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai    | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut          | Pemerintah Kabupaten Tambrauw               | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                            |
| Pemerintah Kabupaten Simalungun         | Pemerintah Kabupaten Tapin               | Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni          | Kementerian Pemuda dan Olah Raga  |
| Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan   | Pemerintah Kota Banjarbaru               | Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama          | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi                   |
| Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah    | Pemerintah Kota Banjarmasin              | Pemerintah Kota Sorong                      | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi                             |
| Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara     | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur     | Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Tengah | Kementerian Perdagangan   |
| Pemerintah Kabupaten Toba               | Pemerintah Kabupaten Berau               | Pemerintah Kabupaten Jayawijaya             | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |

|   |  |                                       |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Pemerintah Kota Binjai                  | Pemerintah Kabupaten Kutai Barat         | Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya       | Kementerian Perhubungan                                |
| Pemerintah Kota Gunung Sitoli           | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara   | Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah | Kementerian Perindustrian                              |
| Pemerintah Kota Medan                   | Pemerintah Kabupaten Kutai Timur         | Pemerintah Kabupaten Nduga            | Kementerian Pertahanan                                 |
| Pemerintah Kota Padangsidempuan         | Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu         | Pemerintah Kabupaten Tolikara         | Kementerian Pertanian                                  |
| Pemerintah Kota Pematang Siantar        | Pemerintah Kabupaten Paser               | Pemerintah Kabupaten Yahukimo         | Badan Riset dan Inovasi Nasional                       |
| Pemerintah Kota Sibolga                 | Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara | Pemerintah Kabupaten Yalimo           | Kementerian Sekretariat Negara                         |
| Pemerintah Kota Tanjung Balai           | Pemerintah Kota Balikpapan               | Pemerintah Provinsi Papua Selatan     | Kementerian Sosial                                     |
| Pemerintah Kota Tebing Tinggi           | Pemerintah Kota Bontang                  | Pemerintah Kabupaten Asmat            | Kepolisian Negara Republik Indonesia                   |
| Pemerintah Provinsi Sumatera Barat      | Pemerintah Kota Samarinda                | Pemerintah Kabupaten Boven Digoel     | Komisi Aparatur Sipil Negara                           |
| Pemerintah Kabupaten Agam               | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara     | Pemerintah Kabupaten Mappi            | Komisi Pemberantasan Korupsi                           |
| Pemerintah Kabupaten Dharmasraya        | Pemerintah Kabupaten Bulungan            | Pemerintah Kabupaten Merauke          | Lembaga Administrasi Negara                            |
| Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai | Pemerintah Kabupaten Malinau             | Pemerintah Kabupaten Deiyai           | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah |
| Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota    | Pemerintah Kabupaten Nunukan             | Pemerintah Kabupaten Dogiyai          | Lembaga Ketahanan Nasional                             |
| Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman    | Pemerintah Kabupaten Tana Tidung         | Pemerintah Kabupaten Intan Jaya       | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban                  |
| Pemerintah Kabupaten Pasaman            | Pemerintah Kota Tarakan                  | Pemerintah Kabupaten Mimika           | Ombudsman Republik Indonesia                           |

|                                      |   |                                  |   |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat   | Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara                    | Pemerintah Kabupaten Nabire      | Perpustakaan Nasional                                     |
| Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan | Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow                | Pemerintah Kabupaten Paniai      | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan           |
| Pemerintah Kabupaten Sijunjung       | Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan        | Pemerintah Kabupaten Puncak      | Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional             |
| Pemerintah Kabupaten Solok           | Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur          | Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya | Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah              |
| Pemerintah Kabupaten Solok Selatan   | Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara          |                                  | Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat              |
| Pemerintah Kabupaten Tanah Datar     | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe                |                                  | Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia    |
| Pemerintah Kota Bukittinggi          | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro |                                  | Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum                |
| Pemerintah Kota Padang               | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud                 |                                  | Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha     |
| Pemerintah Kota Padang Panjang       | Pemerintah Kabupaten Minahasa                         |                                  | Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial                      |
| Pemerintah Kota Pariaman             | Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan                 |                                  | Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi |
| Pemerintah Kota Payakumbuh           | Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara                |                                  | Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat       |
| Pemerintah Kota Sawahlunto           | Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara                   |                                  | Sekretariat Kabinet RI                                    |
| Pemerintah Kota Solok                | Pemerintah Kota Bitung                                |                                  | Mahkamah Agung  |
| Pemerintah Provinsi Riau             | Pemerintah Kota Kotamobagu                            |                                  | Badan Pangan Nasional                                     |
| Pemerintah Kabupaten Bengkalis       | Pemerintah Kota Manado                                |                                  |   |

|  |  |
|--|--|
| Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir   | Pemerintah Kota Tomohon                |
| Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu    | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah    |
| Pemerintah Kabupaten Kampar            | Pemerintah Kabupaten Banggai           |
| Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti | Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan |
| Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi  | Pemerintah Kabupaten Banggai Laut      |
| Pemerintah Kabupaten Pelalawan         | Pemerintah Kabupaten Buol              |
| Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir       | Pemerintah Kabupaten Donggala          |
| Pemerintah Kabupaten Rokan hulu        | Pemerintah Kabupaten Morowali          |
| Pemerintah Kabupaten Siak              | Pemerintah Kabupaten Morowali Utara    |
| Pemerintah Kota Dumai                  | Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong    |
| Pemerintah Kota Pekanbaru              | Pemerintah Kabupaten Poso              |
| Pemerintah Provinsi Jambi              | Pemerintah Kabupaten Sigi              |
| Pemerintah Kabupaten Batang Hari       | Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una      |
| Pemerintah Kabupaten Bungo             | Pemerintah Kabupaten Tolitoli          |
| Pemerintah Kabupaten Kerinci           | Pemerintah Kota Palu                   |
| Pemerintah Kabupaten Merangin          | Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan   |

|   |   |
|---|---|
| Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi          | Pemerintah Kabupaten Bantaeng                 |
| Pemerintah Kabupaten Sarolangun           | Pemerintah Kabupaten Barru                    |
| Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Pemerintah Kabupaten Bone                     |
| Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Pemerintah Kabupaten Bulukumba                |
| Pemerintah Kabupaten Tebo                 | Pemerintah Kabupaten Enrekang                 |
| Pemerintah Kota Jambi                     | Pemerintah Kabupaten Gowa                     |
| Pemerintah Kota Sungai Penuh              | Pemerintah Kabupaten Jeneponto                |
| Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan      | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar        |
| Pemerintah Kabupaten Banyuasin            | Pemerintah Kabupaten Luwu                     |
| Pemerintah Kabupaten Empat Lawang         | Pemerintah Kabupaten Luwu Timur               |
| Pemerintah Kabupaten Lahat                | Pemerintah Kabupaten Luwu Utara               |
| Pemerintah Kabupaten Muara Enim           | Pemerintah Kabupaten Maros                    |
| Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin       | Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan |
| Pemerintah Kabupaten Musi Rawas           | Pemerintah Kabupaten Pinrang                  |
| Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara     | Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang        |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir                  | Pemerintah Kabupaten Sinjai           |
| Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir         | Pemerintah Kabupaten Soppeng          |
| Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu          | Pemerintah Kabupaten Takalar          |
| Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  | Pemerintah Kabupaten Tana Toraja      |
| Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur    | Pemerintah Kabupaten Toraja Utara     |
| Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | Pemerintah Kabupaten Wajo             |
| Pemerintah Kota Lubuk Linggau                   | Pemerintah Kota Makassar              |
| Pemerintah Kota Pagar Alam                      | Pemerintah Kota Palopo                |
| Pemerintah Kota Palembang                       | Pemerintah Kota Pare-Pare             |
| Pemerintah Kota Prabumulih                      | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara |
| Pemerintah Provinsi Bengkulu                    | Pemerintah Kabupaten Bombana          |
| Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan           | Pemerintah Kabupaten Buton            |
| Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah            | Pemerintah Kabupaten Buton Selatan    |
| Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara             | Pemerintah Kabupaten Buton Tengah     |
| Pemerintah Kabupaten Kaur                       | Pemerintah Kabupaten Buton Utara      |
| Pemerintah Kabupaten Kepahiang                  | Pemerintah Kabupaten Kolaka           |

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Pemerintah Kabupaten Lebong          | Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur     |
| Pemerintah Kabupaten Mukomuko        | Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara     |
| Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong   | Pemerintah Kabupaten Konawe           |
| Pemerintah Kabupaten Seluma          | Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan |
| Pemerintah Kota Bengkulu             | Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan   |
| Pemerintah Provinsi Lampung          | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara     |
| Pemerintah Kabupaten Lampung Barat   | Pemerintah Kabupaten Muna             |
| Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan | Pemerintah Kabupaten Muna Barat       |
| Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah  | Pemerintah Kabupaten Wakatobi         |
| Pemerintah Kabupaten Lampung Timur   | Pemerintah Kota Bau-Bau               |
| Pemerintah Kabupaten Lampung Utara   | Pemerintah Kota Kendari               |
| Pemerintah Kabupaten Mesuji          | Pemerintah Provinsi Gorontalo         |
| Pemerintah Kabupaten Pesawaran       | Pemerintah Kabupaten Boalemo          |
| Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat   | Pemerintah Kabupaten Bone Bolango     |
| Pemerintah Kabupaten Pringsewu       | Pemerintah Kabupaten Gorontalo        |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Pemerintah Kabupaten Tanggamus                | Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara |
| Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang            | Pemerintah Kabupaten Pohuwato        |
| Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat      | Pemerintah Kota Gorontalo            |
| Pemerintah Kabupaten Way Kanan                | Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat   |
| Pemerintah Kota Bandar Lampung                | Pemerintah Kabupaten Majene          |
| Pemerintah Kota Metro                         | Pemerintah Kabupaten Mamasa          |
| Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pemerintah Kabupaten Mamuju          |
| Pemerintah Kabupaten Bangka                   | Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah   |
| Pemerintah Kabupaten Bangka Barat             | Pemerintah Kabupaten Pasangkayu      |
| Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan           | Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar |
| Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah            | Pemerintah Provinsi Bali             |
| Pemerintah Kabupaten Belitung                 | Pemerintah Kabupaten Badung          |
| Pemerintah Kabupaten Belitung Timur           | Pemerintah Kabupaten Bangli          |
| Pemerintah Kota Pangkal Pinang                | Pemerintah Kabupaten Buleleng        |
| Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau            | Pemerintah Kabupaten Gianyar         |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Pemerintah Kabupaten Bintan            | Pemerintah Kabupaten Jembrana   |
| Pemerintah Kabupaten Karimun           | Pemerintah Kabupaten Karangasem |
| Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas | Pemerintah Kabupaten Klungkung  |
| Pemerintah Kabupaten Lingga            | Pemerintah Kabupaten Tabanan    |
| Pemerintah Kabupaten Natuna            | Pemerintah Kota Denpasar        |
| Pemerintah Kota Batam                  |                                 |
| Pemerintah Kota Tanjungpinang          |                                 |
| Pemerintah Provinsi Jawa Barat         |                                 |
| Pemerintah Kabupaten Bandung           |                                 |
| Pemerintah Kabupaten Bandung Barat     |                                 |
| Pemerintah Kabupaten Bekasi            |                                 |
| Pemerintah Kabupaten Bogor             |                                 |
| Pemerintah Kabupaten Ciamis            |                                 |
| Pemerintah Kabupaten Cianjur           |                                 |
| Pemerintah Kabupaten Cirebon           |                                 |
| Pemerintah Kabupaten Garut             |                                 |
| Pemerintah Kabupaten Indramayu         |                                 |
| Pemerintah Kabupaten Karawang          |                                 |
| Pemerintah Kabupaten Kuningan          |                                 |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Pemerintah Kabupaten Majalengka   |
| Pemerintah Kabupaten Pangandaran  |
| Pemerintah Kabupaten Purwakarta   |
| Pemerintah Kabupaten Subang       |
| Pemerintah Kabupaten Sukabumi     |
| Pemerintah Kabupaten Sumedang     |
| Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya  |
| Pemerintah Kota Bandung           |
| Pemerintah Kota Banjar            |
| Pemerintah Kota Bekasi            |
| Pemerintah Kota Bogor             |
| Pemerintah Kota Cimahi            |
| Pemerintah Kota Cirebon           |
| Pemerintah Kota Depok             |
| Pemerintah Kota Sukabumi          |
| Pemerintah Kota Tasikmalaya       |
| Pemerintah Provinsi Jawa Tengah   |
| Pemerintah Kabupaten Banjarnegara |
| Pemerintah Kabupaten Banyumas     |
| Pemerintah Kabupaten Batang       |
| Pemerintah Kabupaten Blora        |
| Pemerintah Kabupaten Boyolali     |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Pemerintah Kabupaten Brebes         |
| Pemerintah Kabupaten Cilacap        |
| Pemerintah Kabupaten Demak          |
| Pemerintah Kabupaten<br>Grobogan    |
| Pemerintah Kabupaten Jepara         |
| Pemerintah Kabupaten<br>Karanganyar |
| Pemerintah Kabupaten Kebumen        |
| Pemerintah Kabupaten Kendal         |
| Pemerintah Kabupaten Klaten         |
| Pemerintah Kabupaten Kudus          |
| Pemerintah Kabupaten<br>Magelang    |
| Pemerintah Kabupaten Pati           |
| Pemerintah Kabupaten<br>Pekalongan  |
| Pemerintah Kabupaten<br>Pemalang    |
| Pemerintah Kabupaten<br>Purbalingga |
| Pemerintah Kabupaten<br>Purworejo   |
| Pemerintah Kabupaten Rembang        |
| Pemerintah Kabupaten<br>Semarang    |
| Pemerintah Kabupaten Sragen         |
| Pemerintah Kabupaten<br>Sukoharjo   |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Pemerintah Kabupaten Tegal           |
| Pemerintah Kabupaten<br>Temanggung   |
| Pemerintah Kabupaten Wonogiri        |
| Pemerintah Kabupaten<br>Wonosobo     |
| Pemerintah Kota Magelang             |
| Pemerintah Kota Pekalongan           |
| Pemerintah Kota Salatiga             |
| Pemerintah Kota Semarang             |
| Pemerintah Kota Surakarta            |
| Pemerintah Kota Tegal                |
| Pemerintah Provinsi DI<br>Yogyakarta |
| Pemerintah Kabupaten Bantul          |
| Pemerintah Kabupaten Gunung<br>Kidul |
| Pemerintah Kabupaten Kulon<br>Progo  |
| Pemerintah Kabupaten Sleman          |
| Pemerintah Kota Yogyakarta           |
| Pemerintah Provinsi Jawa Timur       |
| Pemerintah Kabupaten<br>Bangkalan    |
| Pemerintah Kabupaten<br>Banyuwangi   |
| Pemerintah Kabupaten Blitar          |
| Pemerintah Kabupaten<br>Bojonegoro   |

|                                  |
|----------------------------------|
| Pemerintah Kabupaten Bondowoso   |
| Pemerintah Kabupaten Gresik      |
| Pemerintah Kabupaten Jember      |
| Pemerintah Kabupaten Jombang     |
| Pemerintah Kabupaten Kediri      |
| Pemerintah Kabupaten Lamongan    |
| Pemerintah Kabupaten Lumajang    |
| Pemerintah Kabupaten Madiun      |
| Pemerintah Kabupaten Magetan     |
| Pemerintah Kabupaten Malang      |
| Pemerintah Kabupaten Mojokerto   |
| Pemerintah Kabupaten Nganjuk     |
| Pemerintah Kabupaten Ngawi       |
| Pemerintah Kabupaten Pacitan     |
| Pemerintah Kabupaten Pamekasan   |
| Pemerintah Kabupaten Pasuruan    |
| Pemerintah Kabupaten Ponorogo    |
| Pemerintah Kabupaten Probolinggo |
| Pemerintah Kabupaten Sampang     |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Pemerintah Kabupaten Sidoarjo       |
| Pemerintah Kabupaten<br>Situbondo   |
| Pemerintah Kabupaten Sumenep        |
| Pemerintah Kabupaten<br>Trenggalek  |
| Pemerintah Kabupaten Tuban          |
| Pemerintah Kabupaten<br>Tulungagung |
| Pemerintah Kota Batu                |
| Pemerintah Kota Blitar              |
| Pemerintah Kota Kediri              |
| Pemerintah Kota Madiun              |
| Pemerintah Kota Malang              |
| Pemerintah Kota Mojokerto           |
| Pemerintah Kota Pasuruan            |
| Pemerintah Kota Probolinggo         |
| Pemerintah Kota Surabaya            |
| Pemerintah Provinsi Banten          |
| Pemerintah Kabupaten Lebak          |
| Pemerintah Kabupaten<br>Pandeglang  |
| Pemerintah Kabupaten Serang         |
| Pemerintah Kabupaten<br>Tangerang   |
| Pemerintah Kota Cilegon             |
| Pemerintah Kota Serang              |
| Pemerintah Kota Tangerang           |

|                                       |
|---------------------------------------|
| Pemerintah Kota Tangerang Selatan     |
| Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat  |
| Pemerintah Kabupaten Bengkayang       |
| Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu      |
| Pemerintah Kabupaten Kayong Utara     |
| Pemerintah Kabupaten Ketapang         |
| Pemerintah Kabupaten Kubu Raya        |
| Pemerintah Kabupaten Landak           |
| Pemerintah Kabupaten Melawi           |
| Pemerintah Kabupaten Mempawah         |
| Pemerintah Kabupaten Sambas           |
| Pemerintah Kabupaten Sanggau          |
| Pemerintah Kabupaten Sekadau          |
| Pemerintah Kabupaten Sintang          |
| Pemerintah Kota Pontianak             |
| Pemerintah Kota Singkawang            |
| Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah |
| Pemerintah Kabupaten Barito Selatan   |

|   |
|---|
| Pemerintah Kabupaten Barito Timur       |
| Pemerintah Kabupaten Barito Utara       |
| Pemerintah Kabupaten Gunung Mas         |
| Pemerintah Kabupaten Kapuas             |
| Pemerintah Kabupaten Katingan           |
| Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat |
| Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur |
| Pemerintah Kabupaten Lamandau           |
| Pemerintah Kabupaten Murung Raya        |
| Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau       |
| Pemerintah Kabupaten Seruyan            |
| Pemerintah Kabupaten Sukamara           |
| Pemerintah Kota Palangkaraya            |
| Pemerintah Provinsi DKI Jakarta         |